



RKPD 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 150 ayat (3) huruf d, bahwa Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) harus berpedoman pada RKPD. Terkait dengan hal ini RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 dimaksudkan sebagai tahapan atau komponen dalam mewujudkan pencapaian visi misi Kabupaten Rembang yang pada Tahun 2009 memasuki tahun ke – 4.

B. Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Rembang tahun keempat ke dalam rencana program kegiatan prioritas kabupaten Rembang Tahun 2009.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah :

1. Terlaksananya RPJMD Kabupaten Rembang tahun keempat ke dalam rencana program kegiatan prioritas kabupaten Rembang Tahun 2009.
2. Terciptanya sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2009 yang didahului dengan penyusunan KUA serta PPA yang berdasar pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Penyusunan Renja SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2009.

C. Landasan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 didasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. SE Gubernur Jawa Tengah Nomor : 915/23778 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang RPJMD Tahun 2006 - 2010.

D. Proses Penyusunan

RKPD disusun dengan melihat data dan informasi pada tahun sebelumnya dan berpedoman pada hasil musrenbangdes, musrenbangcam dan diskusi forum gabungan SKPD dengan menggunakan pendekatan perencanaan politik, partisipatif, teknokratik, *top down* dan *bottom up*.

E. Sistematika

Adapun sistematika penulisan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan, proses penyusunan, kedudukan dan ruang lingkup serta sistematika penyusunan RKPD

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum daerah yang meliputi kondisi geografis, kondisi perekonomian daerah, kondisi sarana prasarana, kondisi sosial budaya dan kondisi pemerintahan umum

Bab III. Strategi Pembangunan Daerah

Terdiri dari : Isu Strategis, Kebijakan, Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2009

Bab IV. Kebijakan Ekonomi dan Anggaran Daerah

Terdiri dari : Prospek Ekonomi Tahun 2009, Arah kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Anggaran

Bab V. Rencana Kerja Tahun 2009

Menguraikan Program dan renja SKPD Tahun 2009 serta penganggarannya.

Bab VI. Ringkasan Pendanaan

Bab VII. Kaidah Pelaksanaan

Bab VIII. Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Geografis

1. Geografis

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Rembang terletak pada koordinat 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha, yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.712 ha) disusul oleh Kecamatan Bulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang tersaji pada Tabel II.1

**Tabel II.1
Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2006**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.712
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.525
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.864
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	101.408

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka, 2006

2. Pertanian

Luas Penggunaan lahan di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 seluas 29.976,736 ha, berupa lahan basah, 71.450.244 berupa tanah kering dan seluas 34.772.339 Ha lahan tegalan serta seluas 52.312 Ha lahan perkebunan. Produksi padi di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 sebesar 197.471 ton GKG, naik 87.644 ton (78,57%) dibandingkan produksi tahun 2005 sebesar 110.587 ton. Peningkatan produksi ini merupakan akibat dari peningkatan luas panen tahun 2006 sebesar 13.433 ha (46,8%) dan peningkatan produktivitas sebesar 15,3 kw/ha (37,3%).

Tanaman palawija banyak diusahakan pada lahan yang relatif kering karena ketersediaan air hujan yang terbatas, dan biasanya ditanama pada awal dan akhir musim hujan. Saat itu curah hujan tidak mencukupi untuk tanaman padi. Tanaman jagung merupakan jenis yang paling banyak diusahakan petani di Kabupaten Rembang, yaitu meliputi areal seluas 20.551 ha. Sementara itu, tanaman kacang hijau diusahakan pada areal seluas 7.337 ha dan tanaman kedelai 4.044 ha.

Tanaman sayur-sayuran yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Rembang adalah tanaman cabe merah varietas Tampar, dimana secara khusus mempunyai beberapa keistimewaan seperti rasa pedas cukup tinggi, buah tidak mudah busuk, pencemaran pestisidanya relatif kecil dan produktivitasnya dapat mencapai 11,25 ton/ha, serta harganya di pasaran bersaing. Sentra produksi cabe merah varietas Tampar berada di Kecamatan Sarang, Kragan, Sulang, Sale, Kaliori dan Sumber. Selain tanaman sayur-sayuran, juga terkenal komoditas buah-buahan, antara lain mangga jenis arum manis dan gadung.

3. Peternakan

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah penghasil bibit (bakalan) sapi potong di Jawa Tengah. Populasi sapi potong di daerah ini pada tahun 2006 adalah sebanyak 99.385 ekor, dengan jenis/ras antara lain Peranakan Ongole (PO), American Brahman, Simmental, dan Limousine. Selain sapi potong, Kabupaten Rembang juga sangat potensial bagi pengembangan ternak domba dan kambing. Hal ini bisa dilihat dari populasi kambing sebesar 88.492 dan domba 62.785 ekor (tahun 2006) dengan daerah penyebaran hampir merata di semua Kecamatan. Sedangkan populasi ayam kampung pada tahun 2006 sejumlah 495.063 ekor, yang tersebar merata di semua wilayah Kecamatan.

4. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 adalah kelapa pada areal seluas 7.209 ha dengan produksi 4.912 ton, tanaman tebu seluas 6.140 ha dengan produksi 368.400 ton, kapuk randu seluas 1.564 Ha dengan produksi 319 ton, siwalan seluas 512 Ha dengan produksi 3.518 ton dan yang sedang berkembang wijen seluas 309 Ha dengan produksi 43 ton.

5. Kehutanan

Luas lahan hutan produksi di Kabupaten Rembang hingga 2006 sebesar 21.085 ha, Luas hutan lindung sebesar 2.498,98 ha, hutan rakyat seluas 12.600 ha dan bakau seluas 107 ha. Adapun lahan kritis di Kabupaten Rembang seluas 15.807 ha, sedangkan lahan penghijauan seluas 4.100 ha dan lahan reboisasi seluas 4.457 ha. Tercatat industri pengolahan hasil hutan sebanyak 226 buah.

6. Kawasan Rawan Bencana

Bencana yang sering terjadi di Rembang meliputi bencana tanah longsor, abrasi, kekeringan, intrusi air laut dan banjir. Bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Sedan, Sluke, Sarang, Pancur, Gunem, Sale, Bulu, Pamotan dan Kragan. Bencana abrasi terjadi di wilayah Kec. Sluke, Kragan dan Sarang. Bencana kekeringan sering terjadi hampir semua wilayah Kabupaten Rembang. Bencana banjir terjadi di Kecamatan Kragan, Sarang, Sluke, Pamotan, Lasem dan Pancur.

7. Kelautan dan Perikanan

Salah satu produk andalan Kabupaten Rembang adalah hasil perikanan, baik ikan segar maupun ikan kering. Dengan panjang pantai ± 63,5 km, Kabupaten Rembang mempunyai potensi perikanan laut yang cukup besar. Nilai produksi ikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,03% pertahun. Total produksi perikanan tangkap Kabupaten Rembang pada tahun 2006 sebesar 39.770 ton.

8. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Rembang sebagian wilayahnya terdiri dari gunung kapur banyak mengandung berbagai galian tambang. Kandungan yang terbesar adalah jenis *Alluvium* dengan luas 45.470.783 ha atau 44,84% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, kemudian potensi lain adalah *miosen fasies* sedimen yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68%. Sedangkan bahan galian golongan C yang ada berupa: *andesit* (Kecamatan Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir

kuarsa (Kecamatan Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (Kecamatan Pancur, Kragan, dan Sluke), *phospat* (Kecamatan Gunem, Sale, dan Pamotan), *ball clay* (Kecamatan Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan), batu bard (Kecamatan Gunem dan Sale), serta gipsum (Kecamatan Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem).

B. Perekonomian Daerah

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel II.2 di bawah.

Tabel II.2
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2004-2007

No	Uraian	2004	2005	2006	2007
A	Pendapatan	266.592.331.000	283.165.447.000	481.813.693.000	506.489.833.000
1	Pendapatan Asli Daerah	18.030.574.000	21.092.337.000	24.177.693.000	40.029.635.000
1.1	Pajak Daerah	4.688.500.000	4.692.500.000	5.378.911.990	5.651.040.000
1.2	Retribusi Daerah	11.937.534.000	12.467.337.000	14.291.040.699	26.228.193.000
1.3	Bagian Laba Perusahaan	714.000.000	770.000.000	882.634.466	1.590.565.000
1.4	Lain-lain PAD	690.540.000	3.162.500.000	3.625.105.843	6.559.746.000
2	Dana Perimbangan	231.875.665.000	251.873.110.000	426.987.000.000	435.466.014.000
2.1	Bagi hasil pajak dan bukan pajak	13.341.495.000	13.341.495.000	17.200.000.000	32.585.014.000
2.2	Dana alokasi umum	196.642.000.000	215.234.000.000	342.777.000.000	361.876.000.000
2.3	Dana alokasi khusus	8.130.000.000	11.307.000.000	45.910.000.000	41.005.000.000
2.4	Dana bantuan PS dan Ingub sektoral dan Provinsi	13.762.170.000	11.990.615.000	21.100.000.000	12.360.058.000
3	Lain-lain pendapatan yang sah	16.686.092.000	10.200.000.000	30.649.000.000	30.994.184.000
B	Belanja	287.723.442.000	279.387.971.000	444.825.130.000	565.911.849.000
1	Aparatur Negara / BTL	183.687.751.000	184.018.908.000	240.000.000.000	293.014.416.000
2	Pelayanan Publik / BL	104.035.691.000	95.369.063.000	20.482.513.000	272.897.433.000

Sumber: APBD Kabupaten Rembang Tahun (series)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun 2003-2006, yaitu berturut-turut dari Rp.17,6 milyar, Rp.18,0 milyar, Rp.21,0 milyar dan Rp.24,1 milyar. Selanjutnya retribusi daerah yang memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Rembang terus meningkat dari Rp. 8,1 milyar (2002) menjadi Rp. 10,3 milyar (2003), Rp.11,9 milyar (2004), Rp.12,4 milyar (2005) dan Rp.14,2 milyar (2006). Perusahaan daerah memberikan kontribusi relatif kecil, yaitu 2,43% (2003); 3,96% (2004) dan 3,65% (2005). Pada sub sektor pajak

daerah, kontribusi pajak penerangan jalan dan penambangan galian golongan C cukup tinggi, yaitu 24,28% (2003); 26,00% (2004) dan 22,25 % (2005) dari PAD.

Pada kondisi keuangan Kabupaten Rembang tahun 2002-2006 tersebut terlihat kontribusi dana perimbangan masih sangat besar yaitu berturut-turut sebesar 88,97% (2002), 87,34% (2003), 86,98% (2004), 88,95% (2005) dan 88,63% (2006). Sebaliknya persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 6,69% (2002); 7,07% (2003); 6,76% (2004) dan 7,45% (2005).

Tabel II.3
Persentase Sumbangan Masing-masing Sektor
Terhadap Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2003-2007

No	Uraian	Tahun (dalam %)				
		2003	2004	2005	2006	2007
A	Pendapatan					
1	Pendapatan Asli Daerah	7,07	6,76	7,45	5,02	7,90
1,1	Pajak Daerah	1,72	1,76	1,66	1,12	1,12
1,2	Retribusi Daerah	4,13	4,48	4,40	2,97	5,18
1,3	Bagian Laba Perusahaan	0,17	0,27	0,27	0,18	0,31
1,4	Lain-lain PAD	1,05	0,26	1,12	0,75	1,29
2	Dana Perimbangan	87,29	86,98	88,95	88,62	88,42
2,1	Bagi hasil pajak dan bukan pajak	6,28	5,00	4,71	3,57	6,43
2,2	Dana alokasi umum	75,59	73,76	76,01	71,14	71,45
2,3	Dana alokasi khusus	1,96	3,05	3,99	9,53	8,09
2,4	Dana bantuan PS dan Ingub sektoral dan Provinsi	3,46	5,16	4,23	4,38	2,44
3	Lain-lain pendapatan yang sah	5,58	6,26	3,60	6,36	6,12
B	Belanja					
1	Aparatur Negara (tidak langsung)	62,34	63,84	65,87	53,95	51,78
2	Pelayanan Publik (langsung)	37,66	36,16	34,13	46,05	48,22

Sumber: APBD Kabupaten Rembang diolah

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Total PDRB Kabupaten Rembang pada tahun 2005 berdasarkan harga konstan 2000 sebesar Rp.1.825,5 milyar, dibanding tahun 2006 naik sebesar 5,5% menjadi Rp.1.926,5 milyar. Sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB pada tahun 2003-2005 adalah sektor pertanian (berkisar 47% - 49%).

PDRB Kabupaten Rembang selama tahun 2002-2006 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,16% per tahun. Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar, ternyata hanya mengalami pertumbuhan relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 3,03% per tahun. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut masih jauh di bawah sektor pertambangan dan penggalan yaitu rata-rata sebesar 8,19% per tahun. Sementara itu, sektor jasa-jasa meskipun rata-rata pertumbuhannya mengalami kenaikan 4,25% pertahun, namun pada tahun 2006 sektor ini

mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu sebesar 7,49% daripada sebelumnya tahun 2005 hanya mencapai 4,11%. Berdasarkan data tersebut dapat diprediksikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian dalam tahun-tahun mendatang sebagai kontributor PDRB yang cukup potensial, disamping sektor jasa.

Tabel II.4
Tingkat Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Rembang tahun 2003-2006 (%)

Sektor	Tahun				Rata-rata
	2003	2004	2005	2006	
Pertanian	0,35	5,01	1,99	4,76	3,03
Pertambangan dan Penggalian	11,6	6,80	8,60	5,75	8,19
Industri Pengolahan	3,02	4,47	5,17	5,28	4,49
Listrik, Gas dan Air Bersih	3,36	3,30	2,60	6,71	3,99
Bangunan	3,74	4,40	6,11	7,41	5,42
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	8,69	5,15	5,41	5,89	6,29
Angkutan dan Komunikasi	6,05	5,23	4,37	5,85	5,38
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	8,85	5,42	7,87	2,32	6,12
Jasa-jasa	4,00	1,40	4,11	7,49	4,25
PDRB Kabupaten Rembang	3,01	4,53	3,56	5,53	4,16

Sumber: PDRB Kabupaten Rembang (series)

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Rembang menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari Rp. 2.012 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp.2.237,1 milyar tahun 2003; Rp.2.425 milyar tahun 2004; Rp.2.770,9 milyar pada tahun 2005; dan Rp. 3.214,5 milyar pada tahun 2006. Kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB ini masih berasal dari sektor pertanian, yaitu antara 47% – 50%, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkisar 17%, serta sektor jasa-jasa antara 11% – 12%.

Sektor pertanian walaupun persentase sumbangan terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan dari tahun 2003 sampai tahun 2005 dari 49,03%, 48,69 dan 47,32% namun masih merupakan penyumbang PDRB terbesar. Di lain pihak kontribusi dari sektor lain tidak ada yang meningkat tajam. Hal ini menunjukkan masih adanya dominasi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Rembang dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Rembang tahun 2002-2006 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 12,46% pertahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun cukup tinggi adalah sektor angkutan dan komunikasi (17,02%) serta bangunan (15,5%). Sektor angkutan dan komunikasi ini menunjukkan adanya prospek yang cukup bagus dalam

perekonomian Kabupaten Rembang. Pertumbuhan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Tingkat Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Rembang Tahun 2003-2006 (%)

Sektor	2003	2004	2005	2006	Rata-rata
Pertanian	7,35	7,65	11,07	17,11	10,80
Pertambangan dan Penggalian	18,67	14,00	22,00	11,56	16,56
Industri Pengolahan	12,91	9,48	18,31	15,78	14,12
Listrik, Gas dan Air Bersih	9,68	10,04	13,04	14,71	11,87
Bangunan	12,03	11,08	21,47	17,42	15,50
Perdagangan, Hotel Dan Resto	16,13	7,34	14,22	14,22	12,98
Angkutan dan Komunikasi	24,01	8,79	17,60	17,67	17,02
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	12,29	8,83	16,99	9,89	12,00
Jasa-jasa	12,65	9,84	18,19	14,93	13,90
PDRB ADHB Kab Rembang	11,16	8,40	14,27	16,01	12,46

Sumber: PDRB Kabupaten Rembang (series)

3. Investasi Daerah

Di Kabupaten Rembang terdapat industri pengolahan ikan, baik yang berasal dari investasi dalam negeri maupun luar negeri. Industri pengolahan ikan yang berasal dari investasi dalam negeri adalah CV Karya Mina Putra dengan nilai investasi mencapai Rp. 35 milyar, sedangkan yang berasal dari investasi asing adalah PT Ninbendo Agung (industri pengeringan/pengawetan ikan), dengan nilai investasi sebesar Rp. 316.065.000,- dan US \$.95.000.

Investasi di Kabupaten Rembang tahun 2004-2006 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Investasi di Kabupaten Rembang Tahun 2004-2006

Tahun	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja
2004	CV Karya Mina	35.000.000.000	1200 orang
	PT Ninbendo Agung	316.065.000	-
		US \$ 95.000	
2005	PT Sinar Asia Fortuna	25.000.000.000	700 orang
2006	PT Tongatiur	10.000.000.000	400 orang

Sumber: BPM Prov Jateng, Kabupaten-Kota Pro Investasi 2007

Selain itu, sampai dengan tahun 2007 terdapat sebanyak 15.604 Usaha Kecil dan Menengah non BPR/LKM, 480 buah Koperasi, dan BPR/LKM sebanyak 18 buah.

4. Laju Inflasi

Dari tahun 2002 sampai dengan 2006 tingkat inflasi di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2002 tingkat inflasi sebesar 10.23%, tahun 2003 sebesar 5.25%, tahun 2004 sebesar 5.53%, tahun 2005 sebesar 16.18% dan terakhir tahun 2006 sebesar 5.97%. Adapun perbandingan laju inflasi Kabupaten Rembang dengan Laju inflasi Ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan Laju Inflasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7
Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Semarang dan Kabupaten Rembang

Daerah	2002	2003	2004	2005	2006
Nasional	10.30	4.95	6.23	16.21	6.60
Semarang	13.58	5.93	5.83	15.61	6.08
Rembang	10.23	5.25	5.53	16.18	5.97

Sumber : Indikator Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Rembang Tahun 2006

C. Sosial Budaya

1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang sampai dengan akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 596.213 jiwa, dimana laju pertumbuhan penduduk semakin lambat. Jumlah penduduk perempuan relatif sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan banyaknya Kepala rumah tangga adalah 152.557 KK, rata-rata anggota keluarga 3,91 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk sebesar 589 jiwa/km².

Tabel II.8
Penduduk Kabupaten Rembang dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2003 - 2006

Tahun	Laki-laki	Perempuan	KK	Jumlah	Pertumbuhan
2003	289.199	289.954	148.042	579.153	1,72
2004	292.255	293.191	149.030	585.446	1,09
2005	295.170	296.338	150.767	591.508	1,04
2006	297.837	299.376	152.557	597.213	0,96

Sumber : Rembang dalam angka 2006

2. Ketenagakerjaan

No	Uraian	2007	2008
1	Angkatan Kerja	375.491	387.404
2	Pekerja	311.159	317.292
3	% Pekerja	62.79	63.49
4	Cari Kerja	37.931	35.712
5	Pengangguran	50.526	47.464
6	TPAK	75.77	77.52
7	TP terbuka	10.10	9.22
8	Tk. Pengangguran	13.46	12.25
9	Penduduk miskin (Susenas-Suseda)	147.316	133.998
10	% penduduk miskin	24.57	22.17
11	RT miskin (PSE-BLT)	60.843	55.832
12	% RTM (PSE-BLT)	37.38	33.49
13	Penduduk miskin (PSE-BLT)	205.559	187.736
14	% Penduduk Miskin	34.28	31.06

Sumber : Indikator Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Rembang Tahun 2006

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan sebesar 1,75 , seiring dengan itu persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,88 atau tingkat pengangguran menurun sebesar 3.062. Hal ini disebabkan karena jumlah penambahan lapangan kerja yang semakin banyak. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer (pertanian dalam arti luas) yaitu 129,571 (49,26 %) diikuti sektor tersier (perdagangan, jasa, transportasi, keuangan dan lainnya) 102,373 (38,92 %) dan sisanya sektor sekunder (Industri, pertambangan dan Penggalian, Listrik/gas/air, dan konstruksi) 31,088 (11,82 %).

3. Kemiskinan

Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 Kecamatan yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 287 Desa. Sebagian besar merupakan Desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu 165 desa (56,12%) kategori desa tertinggal dan 55 desa (18,70%) kategori desa sangat tertinggal, sedangkan sisanya termasuk kategori desa tidak tertinggal. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 tercatat sebanyak 205.559 Jiwa atau 34,28 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Rembang, namun demikian pada tahun 2008 telah mengalami penurunan menjadi 187.736 jiwa atau 31,06% dari jumlah penduduk . Penyebab ketertinggalan dan kemiskinan ini adalah belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana dasar masyarakat, lemahnya akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, dan belum optimalnya kelembagaan tingkat desa.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Desa dan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan Desa telah diupayakan melalui terbentuknya dan berfungsinya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP), Posyandu dan kelembagaan sejenisnya, namun peranserta aktif masyarakat masih perlu dioptimalkan.

4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah Klinik KB di Kabupaten Rembang tahun 2006 sebanyak 23 klinik. Adapun jumlah Wanita Usia Subur (WUS= usia 15 s/d 49 th) tercatat sebanyak 165.377 jiwa dan 123.840 diantaranya berstatus kawin

Tabel II.9
Banyaknya WUS dan PUS menurut Kelompok Umur tahun 2006

Kelompok Umur	WUS	PUS
15 – 19	25.388	4.505
20 – 24	22.070	13.522
25 – 29	20.642	17.081
30 – 34	27.761	25.388
35 – 39	22.771	21.584
40 – 44	28.232	25.859
45 - 49	18.513	15.901
Jumlah	165.377	123.840

Sumber : Statistik gender dan analisis Kab. Rembang tahun 2006 (BKBPM)

Cakupan peserta KB aktif mencapai 81,89% atau berjumlah 102.115 orang. Persentase Perempuan yang mengikuti program KB dalam tiga tahun menunjukkan penurunan yaitu sebesar 63,02 % (2006), 65,19 % (2005) dan 66,78 % (2004). Sedangkan pemilihan cara KB bervariasi, yakni KB suntik sebesar 58,05 %, menggunakan pil sebesar 20,07 %, menggunakan susuk sebesar 15,19 % dan sisanya 7,50 % menggunakan IUD, MOP, MOV, Kondom, dll.

5. Kesehatan

a. Indikator Derajat Kesehatan

Pada tahun 2006 untuk data umur harapan hidup adalah 70,6 tahun, ini menunjukkan peningkatan dalam enam tahun terakhir, sebagai gambaran bahwa angka harapan hidup tahun 2000 adalah 64,37 tahun. Angka kematian Ibu (AKI) 8 kasus, terdiri dari 2 kasus kematian ibu hamil, 2 kasus kematian ibu bersalin dan 4 kasus kematian ibu nifas. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) ada 178 kasus.

Data angka kematian karena penyakit tertentu ada 6 kasus yaitu Demam Berdarah Dengue sebanyak 4 kasus dari 140 penderita, Kematian karena penyakit Difteri 1 kasus dari 5 penderita, dan leptospirosis 1 kasus dari 1

penderita. Persoalan kesehatan juga terlihat dari angka kesakitan, yakni DBD, malaria, Penyakit TB Paru positif, Kasus penyakit Diare.

Tabel II.10
Angka Kesakitan dan Pertumbuhannya
Di Kabupaten Rembang Tahun 2003-2006

Angka Kesakitan	2003	2004	2005	2006
IR/10.000 DBD	4,5	2,97	2,55	2,35
CFR DBD	2,7	3,5	0	2,86
CDR TB BTA (+)	20	44	40,6	44
API Malaria/1000 pddk	0,04	0,04	0,04	0,07

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Rembang (series);
Hasil Pencapaian SPM Kesehatan kabupaten Rembang, 2006

Berkaitan dengan penyakit menular yang dapat menimbulkan kematian seperti HIV/AIDS dan flu burung, sampai dengan tahun 2007 di Kabupaten Rembang belum ada penemuan *suspect* flu burung. Namun demikian, Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk penyebaran flu burung dan resiko tinggi terjangkitnya HIV/AIDS.

Untuk kasus bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten rembang pada tahun 2006 mengalami kenaikan dari 2,77 % (2005) menjadi 3,21 % (2006). Dari balita sejumlah 33.611 jiwa, sebanyak 2,1 % gizi buruk, balita gizi kurang 21,3 %, balita gizi baik 74 % dan balita gizi lebih 2,6 %.

b. Kesehatan Lingkungan

Pada tahun 2006 di Kabupaten Rembang dari sampling terhadap 22.594 rumah, diperoleh hasil bahwa yang memenuhi syarat sebagai rumah sehat hanya 39%. Sedangkan untuk Tempat-tempat Umum (TTU), dari 6.255 TTU yang ada, sebanyak 64,35% dinyatakan memenuhi syarat dan layak digunakan.

c. Perilaku Hidup Masyarakat

Dari seluruh penduduk Kabupaten Rembang tahun 2006, 76,40% telah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, terdiri dari rawat jalan 74,81 % dan rawat inap 1,59 %. Untuk penduduk yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebanyak 8,33 % yang terdiri dari 6,46 % rawat jalan dan 1,87 % rawat inap. Perilaku hidup sehat di Kabupaten Rembang ditandai dengan peran serta kegiatan masyarakat pada kegiatan Posyandu.

d. Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2006, penduduk yang memanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui Asuransi Kesehatan (Askes PNS) sebesar 7,45 %, melalui JKRS 59,58 % dan melalui Maskin yang mendapat kartu JPKM sebesar 32,97%.

6. Pendidikan

Penyelenggaraan bidang pendidikan indikator keberhasilan wajib belajar 9 Tahun pada tahun ajaran 2006/2007 adalah

- Angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 95,90% dan SLTP sebesar 88,25%. Pada capaian angka yang demikian, berarti masih ada sekitar 4,1% anak usia SD dan 11,75% anak usia SMP yang belum mendapat pelayanan pendidikan.
- Nilai ujian nasional SD adalah 7,20, SLTP sebesar 6,82 dan SLTA 7,01. Kondisi tersebut menunjukkan masih belum optimalnya kualitas pendidikan siswa SD dan SMP.
- Angka transisi SD/MI ke SLTP 97,75% dan SMP/MTs ke Sekolah Menengah sebesar 74,23%, yang berarti masih ada sekitar 2,25% lulusan SD tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan 25,77% lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan ke SLTA dengan alasan ketidakmampuan pembiayaan pendidikan sekolah.
- Rasio murid terhadap guru, TK sebesar 20,47, SD sebesar 18,32, SLTP sebesar 10,02, dan SLTA sebesar 9,91.
- Rasio guru dan sekolah, TK sebesar 1,90, SD sebesar 7,04, SLTP sebesar 38,28 dan SLTA sebesar 48,21.
- Rasio murid dan sekolah, TK sebesar 38,98, SD sebesar 129,00, SLTP sebesar 382,57, dan SLTA sebesar 477,57.
- Angka putus sekolah, SD sebesar 0,11%, SLTP sebesar 0,38%, dan SLTA sebesar 0,09%.

7. Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang paling banyak jumlahnya adalah keluarga miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebanyak 31.06% pada tahun 2007, sedangkan jumlah keluarga rentan mencapai 4.658 KK, anak terlantar sebanyak 8.433 dan 7.887 lansia terlantar serta 5.709 wanita rawan sosial.

Tabel II.11
Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kabupaten Rembang Tahun 2004-2006

No	Penyandang Masalah	2004	2005	2006
1	Lanjut usia terlantar	6457	7413	7887
2	Lanjut usia korban kekerasan	0	193	1
3	Cacat tubuh	757	757	803
4	Tuna Netra	338	338	338
5	Tuna rungu wicara	325	325	328
6	Tuna laras	0	193	279
7	Cacat mental	192	192	245
8	Cacat ganda	54	54	57
9	Bibir Sumbing	0	0	39
10	Cacat eks psikitik	150	150	0
11	Penyakit kronis	0	193	62
12	Penyakit kusta	0	0	0
13	Balita terlantar	3624	2577	2577
14	Anak terlantar	10773	8787	8433
15	Anak Korban Kekerasan	1013	193	866
16	Anak nakal	655	193	556
17	Anak Cacat	26	1351	653
18	Anak cacat tubuh	227	227	0
19	Anak Cacat Rungu Wicara	68	68	0
20	Anak cacat netra	51	51	0
21	Anak cacat mental	42	42	0
22	Anak cacat Eks Psikitik	26	26	0
23	Anak cacat ganda	18	18	0
24	Penyakit HIV	0	193	0
25	Gelandangan dan Pengemis	50	50	52
26	Wanita Tuna Susila	0	192	89
27	Korban Narkoba	0	193	20
28	Wanita Korban Kekerasan	0	202	92
29	Eks Napi	0	193	562
30	Fakir Miskin (KK)	103461	103461	37970
31	Rumah Tidak Layak	15432	170	18946
32	Sosial Psikologi	1613	193	225
33	Keluarga Rentan	4095	193	4658
34	Masyarakat Daerah Rawan Bencana	2926	193	2948
35	Korban bencana alam	321	193	1037
36	Korban Bencana Sosial	729	193	0
37	Pekerja Migran	0	193	85
38	Anak Jalanan	390	193	477
39	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	0	198	5709
40	Komunitas Adat Terpencil	3506	3506	1413
41	Korban Bencana dan Musibah Lainnya	0	0	0

Sumber : Hasil Pencapaian SPM Kabupaten Rembang Tahun 2006

Pada tahun 2006 di Kabupaten Rembang terdapat sebanyak 10 buah panti sosial yang khusus menangani PMKS, terdiri dari 7 buah panti asuhan dengan jumlah penghuni sebanyak 320 orang, Panti wreda sebanyak 1 buah dengan penghuni

80 orang, Panti Jompo sebanyak 1 buah dengan jumlah penghuni 80 orang dan panti khusus sebanyak 1 buah dengan penghuni sebanyak 100 orang.

Kabupaten Rembang juga memiliki beberapa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), antara lain sebanyak 13 organisasi sosial dengan jumlah penanganan penyandang sosial yang dilakukan mencapai 302 orang. Sementara itu, jumlah pekerja sosial masyarakat adalah sebanyak 1.898 orang, baik pegawai negeri maupun swasta. Adapun jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) di Kabupaten Rembang adalah sebanyak 352 orang

8. Agama

Dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk Kabupaten Rembang adalah penganut agama Islam, terdapat juga pemeluk Agama Kristen, pemeluk Agama Katolik, pemeluk Agama Hindu, pemeluk agama Budha dan pemeluk agama lainnya.

Tabel II.12
Banyaknya Pemeluk Agama dan Pertumbuhannya
Di Kabupaten Rembang Tahun 2004-2006

No	Agama	2004	2005	2006
1	Islam	571.307	570.307	572.432
2	Kristen	3.041	3.041	3.275
3	Katolik	3.121	3.121	3.225
4	Hindu	105	105	126
5	Budha	1.174	1.174	1.152
6	Lainnya	21	21	21

Sumber : Hasil Pencapaian SPM Kabupaten Rembang Tahun 2006

D. Sarana dan Prasarana

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Prasarana transportasi berupa jalan di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 mencapai ± **761,01** km, yang terbagi dalam 5 kelas menurut permukaannya, yaitu permukaan aspal, makadam/krikil, tanah, hotmix dan beton seperti pada tabel berikut :

Tabel II.13
Panjang Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang
Tahun 2002-2006

No	Karakteristik	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
Panjang jalan (km)						
a	Aspal					
	1. Jalan Kab	482,79	482,79	510,99	510,99	600,95

No	Karakteristik	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
	2. Jalan Provinsi	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45
	3. Jalan Negara	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81
	Bukan Aspal					
	1. Jalan Kab	76,5	76,5	48,3	48,3	41,80
	2. Jalan Provinsi	0	0	0	0	0
	3. Jalan Negara	0	0	0	0	0
	Jumlah					
	1. Jalan Kab	559,29	559,29	559,29	559,29	642,75
	2. Jalan Provinsi	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45
	3. Jalan Negara	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81
	Jumlah Semua	677,55	677,55	677,55	677,55	761,01
II	Jembatan					
	Kabupaten					
	1. Jumlah	142	142	142	142	126
	2. Panjang (m)	1244,3	1244,3	1244,3	1244,3	1.246,90
	Provinsi/Negara					
	1. Jumlah	10	10	10	10	105
	2. Panjang (m)	1058	1058	1058	1058	1.026,40
	Jumlah II					
	1. Jumlah	248	248	248	248	231
	2. Panjang (m)	2302,3	2302,3	2302,3	2302,3	2.273,30

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Rembang, 2006

Secara umum kondisi jalan baik negara, provinsi maupun kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari 63,13% dalam kondisi rusak dan rusak berat (Tabel II.14)

Tabel II.14
Kondisi Jalan di Kabupaten Rembang 2002-2006

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Baik	190,09	224,24	106,55	218,94	237,01
2	Sedang	142,70	92,90	96,02	110,4	171,49
3	Rusak	139,20	131,10	246,32	113,6	160,32
4	Rusak Parah	86,10	109,85	109,2	115,15	73,93
	Jumlah	558,09	558,09	558,09	558,09	642,75

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka (Series)

b. Air Bersih

Penyediaan air bersih di Kabupaten Rembang sebagian besar secara swadaya di lakukan oleh masyarakat. Pengelolaan prasarana air bersih terdiri dari penyediaan air bersih perdesaan non sistem oleh DPU dan penyediaan air minum sistem oleh PDAM Kabupaten Rembang. Potensi sumber air termanfaatkan oleh PDAM kondisi sampai dengan tahun 2007 seperti dalam tabel berikut :

Tabel II.15
Pemanfaatan Sumber Air dan Kapasitas Produksi oleh PDAM Tahun 2006

No	SUMBER AIR TERMANFAATKAN	KAPASITAS SUMBER AIR (L/D/T)	KAPASITAS TERPASANG (L/D/T)	KAPASITAS PRODUKSI (L/D/T)	KET
I	Mata Air :				
	- Mudal Pamotan	70	60	46	Beroperasi
	- Sumber Suco	1	1	1	Beroperasi
	- Taban Bulu	2	2	2	Beroperasi
	- Pasedan Bulu	1	1	1	Beroperasi
	- Kajar	2	2	2	Beroperasi
II	Air Permukaan :				
	- Jakinah Sale	500	100	85	Beroperasi
	- Embung Lodan	5.000.000	20	20	Tdk Beroperasi
	- Embung Banyukuwung	m3 1.500.000 m3	35	29	Beroperasi
III	Sumur Dalam :				
	- Lodan Kulon	-	5	-	Sumur rusak
	- Ngulaan Bulu	5	-	4	Beroperasi

Sumber : PDAM Rembang, 2007

Sementara itu jumlah pelanggan PDAM Rembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut :

Tabel II.16
Pelanggan PDAM Rembang
Tahun 2003-2007

NO	JENIS PELANGGAN	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
1	Hydran Umum	134	125	130	127	118
2	Rumah Tangga	10.839	11.294	12.483	12.726	12.977
3	Niaga	455	459	907	907	911
4	Industri	22	22	31	27	32
5	Instansi Pemerintah	132	132	111	116	125
6	Sosial	357	368	421	424	426
	JUMLAH	11.939	12.400	14.083	14.327	14.589

Sumber : PDAM Rembang, 2007

Tabel II.17
Cakupan Pelayanan PDAM Rembang
Tahun 2002-2006

No	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
1	Jumlah Penduduk	572.737	579.153	585.446	591.508	597.633
2	Jumlah Penduduk terlayani	246.959	236.698	249.885	268.992	242.794
3	Jumlah pelanggan	90.225	95.615	96.690	107.595	109.965
4	Cakupan Pelayanan	11.550	11.939	12.400	14.083	14.327
5	Prosentase	0,1575	0,1651	0,1652	0,1819	0,1840

Sumber : PDAM Rembang, 2007

c. Persampahan

Kondisi eksisting pelayanan persampahan di Kabupaten Rembang hanya mampu melayani penduduk sebesar 37% dan sampah terangkut sebesar 85%, dimana pelayanan sebagian besar terhadap penduduk tinggal di kawasan perkotaan Rembang dan Ibu Kota Kecamatan. Selengkapnya kondisi pelayanan sampah seperti dalam tabel berikut :

Tabel II.18
Pelayanan Persampahan di Kab. Rembang Tahun 2007

Jenis	Volume
Timbulan sampah	3,965 lt/org/hari
Produksi sampah	212,7 m3/hari
Sampah terangkut	85%
Penduduk terlayani	37%

Khusus di wilayah perkotaan Rembang, diprediksikan produksi sampah di kawasan perkotaan Rembang yang harus ditangani adalah sebagai berikut :

Tabel II.19
Produksi Sampah Di Kawasan Perkotaan Rembang Yang Harus Ditangani

No	Deskripsi	Satuan	Tahun Perencanaan			
			2011	2016	2021	2026
A	PRODUKSI SAMPAH DOMESTIK					
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	70,767	77,515	85,527	95,045
2	Tingkat Pelayanan	%	60	70	80	90
3	Penduduk Terlayani	Jiwa	42,46	42,46	54,26	85,541
4	Timbulan Sampah	ltr/or/hari	1.60	1.60	1.60	1.60
5	Produksi Sampah	m3/hari	113.23	124.02	136.84	152.07
6	Sampah Terlayani	m3/hari	67.94	86.82	109.47	136.87
	Sub Total Produksi Sampah	m3/hari	82.60	109.04	145.09	196.84
B	PRODUKSI SAMPAH NON DOMESTIK					
1	Pasar kota	m3/hari	137.36	151.10	166.21	182.83
	Pasar magersari	m3/hari	100.55	110.61	121.67	133.84
2	Terminal bus	m3/hari	53.20	58.52	64.37	70.81
	Terminal angkot	m3/hari	31.63	34.80	38.28	42.10
3	Industri	m3/hari	45.95	50.54	55.60	61.16
4	Non domestik lainnya	m3/hari	115.26	126.79	139.46	153.41
	Sub total Non Domestik	m3/hari	483.95	532.35	585.58	644.14
	Total Timbulan Sampah	m3/hari	566.55	641.39	730.67	840.98
	Sampah Terlayani	m3/hari	551.89	619.17	695.05	781.01

Sumber : RDTRK Rembang tahun 2006 - 2026

Mengingat pentingnya penyehatan lingkungan permukiman maka pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang ke depan harus segera dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu ramah lingkungan dan berkelanjutan.

d. Sumber Daya Air

Potensi sungai yang ada di wilayah Kabupaten Rembang adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel II.20

Daftar Sungai-Sungai di Wilayah Kabupaten Rembang

No	Nama Sungai	Panjang Sungai			Panjang Tanggul	
		Panjang (km)	Luas DAS (km ²)	Q hilir (m ³ /detik)	Kanan (Km)	Kiri (Km)
1	Randu Gunting	48	65	1,43	40	40
2	Sudo	13,8	40	5,84	10	10
3	Karanggeneng	43,5	60	2,01	20	20
4	Kabongan	4	79	0,34	4	4
5	Tireman	4,5	44	0,31	4,5	4,5
6	Kali Untu	5,5	40	1,24	5	5
7	Banggi	7,9	43	0,1	6	6
8	Babagan	23,5	44	0,96	20	20
9	Patihan	24,5	28	0,57	21	21
10	Bonang	5,9	20	0,09	5	5
11	Klepu	5,5	71	0,08	5	5
12	Leran	8	70	0,12	8	8
13	Trahan	6,5	25	0,08	6,5	6,5
14	Nyemplung	3,5	2	0,07	3,5	3,5
15	Jetis	2,5	9	0,33	2,5	2,5
16	Raketan	5,5	7	0,09	5,5	5,5
17	Pendok	4	4	0,04	4	4
18	Bendo	6	3	0,55	6	6
19	Jambu	1,5	2	0,04	0,5	0,5
20	Labuhan	7,5	25	0,07	1,25	1,25
21	Kenong	1,25	2	0,08	0,75	0,75
22	Woro	7	6	0,43	5	5
23	Kedung Rumpit	12	59	0,23	10	10
24	Sendang Waru	43	63	0,53	20	20
25	Gamang Pang	47	70	0,34	40	40
26	Sampung	17	90	0,2	17	17
27	Kening	19	14	1,03	15	15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bid. Sumber Daya Air Kab. Rembang, 2006

Potensi embung yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel. II.21

Daftar Embung-Embung yang Ada di Kabupaten Rembang

No.	NAMA EMBUNG	LOKASI		VOLUME (m ³)	AREAL IRIGASI (Ha)	KET.
		DESA	KECAMATAN			
1	Lodan	Lodan	Sarang	4.000.000	270	berfungsi
2	Tawang Rejo	Tawangrejo	Sarang	50.000	30	Berfungsi
3	Temperak/Kasur	Temperak	Sarang	40.000	190	Berfungsi
4	Kendal Agung	Kendal Agung	Kragan	30.000	114	Berfungsi untuk irigasi
5	Trembes/Precet	Trembes	Gunem	60.000	124	irigasi
6	Suruhan	Trembes	Gunem	30.000	15	Berfungsi
7	Pasucen	Pasucen	Gunem	15.000	20	Berfungsi
8	Sumbreng	Samaran	Pamotan	30.000	60	Berfungsi
9	Pragen	Pragen	Pamotan	20.000	18	Berfungsi
10	Ketangi	Ketangi	Pamotan	20.000	30	Berfungsi

No.	NAMA EMBUNG	LOKASI		VOLUME (m ³)	AREAL IRIGASI (Ha)	KET.
		DESA	KECAMATAN			
11	Kumendung	Kumendung	Rembang	60.000	102	Berfungsi
12	Kasreman	Kasreman	Rembang	20.000	175	Berfungsi
13	Rowosetro	Pasar Banggi	Rembang	60.000	25	Tidak berfungsi
14	Brogo	Kasreman	Rembang	16.000	10	Berfungsi
15	Ngotet	Ngotete	Rembang	3.000	25	Berfungsi
16	Jatimudo	Jati Mudo	Sulang	50.000	64	Berfungsi
17	Padaran	Padaran	Rembang	20.000	50	Berfungsi
18	Sendang Mulyo	Sendang Mulyo	Bulu	40.000	15	Berfungsi
19	Pucung	Sendang Mulyo	Bulu	30.000	30	Berfungsi
20	Kembang	Pinggan	Bulu	3.000	30	Berfungsi
21	Pengkol	Pengkol	Kaliori	3.000	20	Berfungsi
22	Jatihadi	Jati Hadi	Sumber	40.000	39	Berfungsi
23	Kerep	Kerep	Rembang	20.000	35	Berfungsi
24	Brubulan	Tahunan	Sale	10.000	178	Berfungsi
25	Banyu Kuwung	Sudo	Sulang	1.500.000	775	Berfungsi
			JUMLAH	6.170.000	2.444	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bid. Sumber Daya Air Kab. Rembang, 2006

Prasarana pengairan yang terdapat di Kabupaten Rembang meliputi saluran primer, sekunder dan tersier. Saluran primer yang dimiliki sepanjang 116.467 meter, panjang saluran sekunder 119.123 meter sedangkan panjang saluran tersier 34.951 meter. Data panjang saluran irigasi di Kabupaten Rembang disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.22
Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Rembang (m)
Tahun 2002-2006

Jenis Irigasi		Panjang (m)				
		2002	2003	2004	2005	2006
Teknis	Primer	119.267	119.267	115.292	119.267	116.467
	Sekunder	119.123	119.123	119.123	119.123	119.023
	Tersier	34.951	34.951	34.951	34.951	34.951

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Rembang, 2006

2. Perhubungan

Prasarana dan sarana transportasi umum di Kabupaten Rembang sampai tahun 2006 berupa terminal klas A dan B masing-masing 1 buah serta terminal klas C berjumlah 8 buah. Kondisi Kabupaten Rembang yang masih didominasi daerah pedesaan menjadikan sarana transportasi utama masyarakat di daerah tersebut adalah angkutan pedesaan. Pada tahun 2005 tercatat jumlah perusahaan yang mempunyai trayek angkutan pedesaan berjumlah 158 buah, dengan jumlah armada sebanyak 357 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten

Rembang. Data kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Rembang selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.23
Kondisi Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Rembang
Tahun 2003-2005

No	Karakteristik	2003	2004	2005
1	Terminal Kelas A (unit)	1	1	1
	Terminal Kelas B (unit)	1	1	1
	Terminal Kelas C (unit)	8	8	8
2	Jembatan Timbang (unit)	1	1	1
3	Persh. Angk. Penumpang			
	Otobus			
	a. Jumlah perusahaan (perusahaan)	5	5	5
	b. Jumlah armada AKDP (unit)	36	36	36
	c. jumlah armada AKAP (unit)	38	38	38
	Angkudes			
	a. Jumlah perusahaan (perusahaan)	125	137	158
	b. Jumlah armada (unit)	314	330	357
	Mini bus			
	a. Jumlah perusahaan (perusahaan)	9	10	12
	b. Jumlah armada (unit)	57	57	59
4	Arus lalu lintas bus (trip)			
	Terminal Rembang			
	a. AKDP	801	954	1024
	b. AKAP	793	1024	1628
	Terminal Lasem			
	a. AKDP	3641	4318	4683
	b. AKAP	35295	35008	35217
	c. Angkudes	35967	39863	41219

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Rembang, 2006

Terminal angkutan penumpang di Kabupaten Rembang yaitu terminal Rembang tipe B dan Terminal Lasem tipe A, sementara subterminal yang berfungsi melayani angkutan kota/pedesaan berada di Kecamatan Sumber, Sulang, Bulu, Pamotan dan Sarang. Terminal penumpang Rembang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar propinsi dan antar kota dalam provinsi. Arus lalu lintas di terminal Rembang masih didominasi oleh jenis bus AKAP, dengan jumlah trip mengalami kenaikan rata-rata sebesar 29,93%. Sementara arus lalu lintas AKDP hanya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,15%. Di terminal Lasem, arus lalu lintas bus banyak didominasi oleh bus AKDP, dengan pertumbuhan sebesar 13,14%, sedangkan mobilitas angkudes mengalami kenaikan sebesar 9,51%. Permasalahan lingkungan terkait dengan keberadaan terminal ini antara lain karena posisi terminal terletak di dalam kota, sehingga

mengakibatkan kebisingan dan polusi udara yang mengganggu lingkungan sekitarnya.

Angkutan laut di Kabupaten Rembang dilayani oleh Pelabuhan Rembang, mempunyai luas sekitar 14.000 m². Pelabuhan ini melayani angkutan hasil tambang, bahan bangunan, dan berbagai hasil bumi lainnya ke berbagai daerah dan pulau di Indonesia. Misalnya bahan galian C yang dikirim ke Pulau Kalimantan dan sebaliknya kayu untuk bahan baku industri dari Kalimantan diturunkan di pelabuhan ini. Prasarana angkutan laut yang berupa menara mercusuar berjumlah sembilan buah sejak tahun 2003 hingga sekarang.

3. Kesehatan

Cakupan rumah sehat tahun 2006 adalah sebesar 39% dan jamban sehat 66,37 % (target tahun 2010: 85 %), Cakupan Spal tahun 2006 sebesar 45,70 % (target tahun 2010: 86 %), sehingga diperlukan kegiatan promotif untuk meningkatkan sarana kesehatan lingkungan. Sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Rembang masih membutuhkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Tabel II.24
Jumlah dan Jenis sarana pelayanan Kesehatan Tahun 2006

No	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	16
3	Puskesmas Keliling	16
4	Puskesmas Pembantu	71
5	Polindes/PKD	176
6	Posyandu	1213
7	Balai pengobatan/klinik	4
8	Apotik	8
9	Toko Obat	10
10	Praktek Dokter Bersama	1
11	Pusat Pencegahan penyakit dan promosi kesehatan	5

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Rembang (series);
Hasil Pencapaian SPM Kesehatan kabupaten Rembang, 2006

4. Telekomunikasi dan Informasi

Sarana prasarana telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Rembang berupa kantor pos, wartel, warnet dan sambungan telepon PT Telkom. Kantor pos yang ada di seluruh Kabupaten Rembang sampai tahun 2006 berjumlah 10 unit, tidak bertambah sejak tahun 2003. Sementara sambungan telepon yang dipakai oleh pelanggan hingga tahun 2006 meningkat rata-rata 2% pertahun, yaitu dari 4500 Satuan Sambungan Telepon (SST) pada tahun 2003 menjadi 4823 SST pada

tahun 2006. Keberadaan wartel pada tahun 2006 mengalami kelesuan, terbukti dari jumlahnya yang menurun 21,51% dari tahun 2005 hingga 2006 (dari 93 unit menjadi tinggal 73 unit). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.25
Kondisi Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi
di Kabupaten Rembang Tahun 2003-2006

No	Sarana/prasarana	Sat	2003	2004	2005	2006
1	Kantor Pos	unit	10	10	10	10
2	Telekomunikasi					
	- Kapasitas Sentral	SST	4500	4500	4600	4823
	- Kapasitas Terpasang	SST	4500	4600	4600	4823
	- Kapasitas Terpakai	SST	4424	4450	4526	4463
	- Pelanggan	SST	4424	4450	4450	4572
	- Telepon Umum	SST	5	2	0	0
	- Telepon Koin	SST	5	3	0	1
	- Telepon Kartu	SST	15	12	11	5
	- Wartel	unit	72	84	93	73
	- Warnet	unit	0	1	1	2

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka (series)

Diprediksikan dalam tiga tahun ke depan, kondisi sarana prasarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Rembang masih akan berkembang. Sambungan telepon diperkirakan akan meningkat 1-2% pertahun, dengan konsekuensi akan menurunkan keberadaan wartel sekitar 5-10% pertahun. Oleh karena itu pembangunan bidang komunikasi dan informasi ini harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kecil.

D. Pemerintahan Umum

1. Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan catatan sipil oleh Pemerintah Kabupaten Rembang antara lain pemberian akte kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian serta pelayanan pemberian KTP dan Kartu Keluarga (KK). Akte kelahiran merupakan jenis akte yang paling banyak dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, disusul dengan akte perkawinan. Pada tahun 2006, jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan mencapai 39.135 buah meningkat 12,42% dari tahun 2005, sedangkan akte perkawinan berjumlah 54 buah (Tabel II.21)

Tabel II.26
Jumlah Akte Yang Dikeluarkan Kantor Catatan Sipil
Di Kabupaten Rembang Tahun 2004-2006

No	Jenis Akte	2004	2005	2006
1	Kelahiran	48421	34811	39135
2	Perkawinan	45	54	54
3	Perceraian	5	8	8
4	Kematian	54	38	45
5	Surat keterangan dan tanda	14	30	1
6	Pencatatan pengakuan anak	2	1	-
7	Salinan akta	14	2	6
	Jumlah	48553	34944	39249

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, 2006

2. Statistik

Ketersediaan informasi statistik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan wajib statistik yang dihadapi di Kabupaten Rembang adalah belum sempurnanya sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi daerah sehingga pelayanan data/informasi baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat belum optimal.

Usaha yang telah dilakukan diantaranya oleh BPS Kabupaten Rembang adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan buku : Kabupaten Rembang Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang, Indikator Sosial Ekonomi dan lain-lain.

3. Kepegawaian

Jumlah Total PNS di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 adalah sebanyak 7.365 orang dengan komposisi : golongan I sebesar 1,00%, golongan II sebesar 21,52%, golongan III sebesar 45,36% dan golongan IV sebesar 32,12%.

Tabel II.27
Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi
Kepegawaian
Di Kabupaten Rembang Tahun 2003-2006

No	Kriteria	2003	2004	2005	2006
I	Administrasi pemerintahan				
a	Jumlah Kecamatan (buah)	14	14	14	14
b	Jumlah Kelurahan (buah)	7	7	7	7
c	Jumlah Desa (buah)	287	287	287	287
II	Aparatur Negara				

No	Kriteria	2003	2004	2005	2006
a	PNS (orang)				
1	Golongan I	159	127	109	74
2	Golongan II	1791	1639	1781	1585
3	Golongan III	4398	4131	4060	3341
4	Golongan IV	1011	1405	1598	2365
b	Pejabat Struktural (orang)				
1	Eselon I	0	0	0	0
2	Eselon II	15	27	21	18
3	Eselon III	85	103	105	105
4	Eselon IV	335	385	382	361
5	Eselon V	0	50	50	56
c	Pejabat Fungsional (orang)	4554	4519	4478	4822
d	Pensiunan PNS (orang)	85	72	129	151
III	Organisasi Daerah (buah)				
a	Jumlah Bagian	10	10	10	10
b	Jumlah Dinas	8	12	12	12
c	Jumlah Kantor	8	4	4	4
d	Jumlah Badan	2	5	5	5

Sumber: Kab Rembang Dalam Angka (series)

4. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan bidang politik dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan demokrasi dan iklim yang kondusif bagi pembangunan di segala bidang. Pada tahun 2007, di Kabupaten Rembang terdapat sebanyak 22 Parpol, 48 Ormas, 15 LSM Lokal, dan 8.039 orang anggota Linmas. Banyaknya kasus kriminalitas mengalami penurunan dari 254 kasus pada tahun 2006 menjadi hanya 85 kasus pada tahun 2007.

5. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Pelayanan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan/desa. Di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 pelayanan KK baru mencapai 31.702 buah buah, sedangkan pelayanan KTP baru sebanyak 68.786 buah.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

A. ISU STRATEGIS

Menghadapi Tahun 2009 permasalahan yang masih selalu didapati oleh Kabupaten Rembang adalah :

1. Masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 31.06 %.
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif berpendidikan rendah serta kurang berkecakupan.
3. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana dan mutu pendidikan.
4. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana dan mutu kesehatan masyarakat.
5. Kondisi dan struktur perekonomian daerah yang belum mampu secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Belum optimalnya kondisi infrastruktur dalam mendukung perekonomian wilayah.

B. KEBIJAKAN

Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2009 sebagai upaya mengatasi permasalahan – permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat terutama di pedesaan;
- 2) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya;
- 3) Meningkatkan mutu dan produktifitas produk unggulan yang dikembangkan;
- 4) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5) Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

C. STRATEGI

Mempertimbangkan isu permasalahan , maka strategi pembangunan Kabupaten Rembang adalah :

- Pengembangan Ekonomi Rembang (PER).
- Meningkatkan pola padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran.
- Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
- Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih dan sanitasi.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari berbagai bidang;
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang aman dan tertib.
- Memperluas akses orang miskin terhadap sumber – sumber modal.
- Meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur publik yang mendukung perekonomian wilayah.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah :

1. Kesyambungan Empat Pilar Pembangunan Daerah

Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik

Program penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik bertujuan : *pertama*, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur wilayah guna memperlancar arus barang, jasa dan penumpang dalam melakukan kegiatan ekonomi; *kedua*, penyediaan infrastruktur kawasan strategis yang diharapkan dapat menarik investasi daerah sebagai pemicu tumbuhnya kegiatan ekonomi baru serta dapat mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat maupun investor. Program penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik meliputi bidang jalan jembatan, sumberdaya air dan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman

Program Sekolah Gratis dan Bermutu pada Jenjang Pendidikan Dasar

Program sekolah gratis pada jenjang pendidikan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat dan tuntas wajib belajar 9 tahun, program Regrouping SD dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pendidikan sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat dioptimalkan, peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan sehingga sesuai standar pelayanan pendidikan. Dalam mengatasi adanya kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah serta kurang efisiennya pengelolaan sekolah dirancang melalui program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dilaksanakan melalui 3 pilarnya yakni manajemen sekolah, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), dan peran serta masyarakat (PSM).

Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS)

Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan upaya peningkatan derajat kesehatan yang ditempuh melalui penanaman perilaku hidup, makan dan lingkungan sehat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Program yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat, yang diharapkan menjadi embrio untuk pengembangan jaminan sosial bidang kesehatan Kabupaten Rembang dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat menuju Rembang Sehat 2010.

Program Pengembangan Ekonomi Rembang

Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang handal dan mandiri di daerah dengan tetap berdasarkan pada demokrasi ekonomi guna meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan memberi perhatian khusus pada usaha kecil, tradisional, dan golongan ekonomi lemah. Pembentukan kelompok-kelompok usaha masyarakat sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta mampu berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Pengembangan ekonomi Rembang ditempuh dengan beberapa skenario pembangunan yaitu :

- Pengembangan PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
- Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang telah dilakukan melalui berbagai program baik melalui bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha maupun peningkatan ketrampilan ekonomi masyarakat. Program

pemberdayaan seperti Program Pengembangan Kecamatan, P2KP, FEDEP, SIBERMAS, dan lainnya diharapkan akan terus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah

- Pembangunan industri sektor pertanian dan sektor produktif lainnya untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Pengembangan Kawasan Prioritas

Penataan kawasan prioritas diselenggarakan untuk mengembangkan kawasan strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan wilayah nasional maupun wilayah provinsi dan wilayah kabupaten dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan ruang kawasan yang bersifat secara serasi, selaras, dan seimbang serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini tujuan utama pengembangan kawasan prioritas adalah antara lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan kawasan yang sangat tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Implementasi pengembangan kawasan prioritas tahun 2009 yang akan dan terus menerus dikembangkan adalah :

- Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT).
- Pengembangan Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri Kabupaten Rembang.
- Pengembangan Kawasan Bonang Binangun Sluke (BBS) Zona I dan II.
- Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Peternakan.
- Pengembangan kawasan Karang Sari Park.

3. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Implementasi prioritas masing – masing bidang pembangunan daerah pada desa – desa yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Rembang sehingga diperlukan strategi pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis pada potensi unggulan lokal dalam rangka menciptakan klaster – klaster ekonomi yang saling berkait dalam kegiatan perekonomian wilayah. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan tahun 2009 memprioritaskan desa – desa sesuai potensinya yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah kecamatan.

BAB IV

KEBIJAKAN EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH

A. PROSPEK EKONOMI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009

Faktor internal dalam pembangunan daerah antara lain adalah terbatasnya sumber – sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah dampak terjadinya perubahan ekonomi nasional dan global, melambatnya perekonomian negara – negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif.

Tantangan pembangunan ekonomi pada Tahun 2009 adalah struktur perekonomian yang masih lemah dan belum mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) atau bahkan kesektor tersier (sektor jasa).

Disisi lain, tuntutan pasar bebas/globalisasi adalah peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk – produk lokal dipasar regional maupun global adalah meningkatkan kualitas dan produktifitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Peluang dibidang ekonomi ditandai dengan adanya keunggulan luasnya pasar serta besarnya potensi sumber daya alam khususnya potensi sektor pertanian dan pertambangan. Sedangkan kendala pengembangan iklim usaha adalah belum memadainya fasilitas infrastruktur, belum optimalnya pelayanan perijinan, regulasi investasi yang belum lengkap instrumennya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada Tahun 2009 diproyeksikan akan berada pada angka 5,75 %, sementara laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 8 %. PDRB berdasarkan harga konstan 2000 diprediksikan mencapai Rp 2.234.786.332.200,- . Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel IV. 1
Estimasi PDRB atas Dasar harga Konstan 2000 Kabupaten Rembang
Tahun 2008 – 2009

Dalam ribuan

Lapangan Usaha	Estimasi 2008	Estimasi 2009	Distribusi
Pertanian	1.022.052.850	1.073.519.779.6	48,04
Tambang & galian	52.174.833	57.814.528.5	2,59
Industri Pengolahan	88.283.498	94.923.296.8	4,25
Listrik, Gas dan Air Bersih	8.066.834	8.464.475.1	0,38
Bangunan	160.093.293	169.570.869.0	7,59
Pertdagangan, Hotel & Restoran	368.971.232	396.923.457.1	17,76
Angkutan dan Komunikasi	114.436.968	122.996.246.6	5,50
Keungan, Persewaan &Jasa Lainnya	50.023.821	52.738.055.6	2,36
Jasa- jasa	249.211.852	257.835.623.7	11,54
PDRB	2.113.315.182	2.234.786.332.2	100

Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2007.

Kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 % diperkirakan akan mencapai Rp.1.166.123.040.960.- Investasi ini mencakup investasi swasta sebesar 80% serta investasi pemerintah (pusat, Provinsi dan Kabupaten) sebesar 20% . Data selengkapnya dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel IV. 2
Realisasi dan Proyeksi Investasi Di Kabupaten Rembang
Tahun 2007 – 2008

Dalam Ribuan

No	Uraian	2007**	2008**	2009**
1	Investasi Swasta	733.025.457	846.013.279	932.898.433
2	Investasi Pemerintah	183.256.364	211.503.319	233.224.608
3	Total Investasi	916.281.821	1.057.516.598	1.166.123.041

Sumber : Bag. Perekonomian Setda Kab. Rembang dan hasil analisis , 2008
 **) Atas dasar harga konstan 2000

Secara Ringkas prospek Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2009

No	INDIKATOR	Kabupaten Rembang	Provinsi Jawa Tengah
1	PDRB (Rp)	2.234.786.332.200 (ADHK 2000)	400 trilyun (ADH Berlaku)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,75	6
3	Inflasi (%)	8,0	7,0 – 8,0
4	PDRB / kapita ADHK 2000	3.683.063	
5	Jumlah pengangguran	44.054	
6	Jumlah Penduduk miskin (Suseda) Berdasar PSE BLT	127.742 (20,97%) 171.459 (28,15 %)	
7	Kebutuhan Investasi Total	Rp 1.166.123.040.960	25 % dari PDRB harga Berlaku
8	ICOR	9,60	4

Sumber : BPS dan Hasil Analisis, 2006

Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

1. Bidang Pertanian dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Pengembangan Agribisnis, meliputi Perlindungan produk, diversifikasi pengolahan, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penyuluhan pertanian, pengendalian hama dan penyakit, penanganan gagal panen, peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
 - o Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi kegiatan fasilitasi bimbingan usaha tani, penguatan modal, kelembagaan keuangan dan penciptaan peluang kerjasama dengan mitra usaha.
 - o Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
 - o Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan
 - o Pengembangan Perikanan Tangkap, meliputi kegiatan fasilitasi pengelolaan sumber daya laut, peningkatan produksi hasil tangkap, diversifikasi produk, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penguatan modal, ijin usaha , pengembangan KBT, penegakan hukum di wilayah laut
 - o Program Budidaya Perikanan
2. Bidang Pertambangan dan galian, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Pengembangan, peningkatan dan pengawasan usaha pertambangan dan konservasi tanah.
 - o Pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam.

3. Bidang Industri Pengolahan, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Pengembangan Industri Kecil dan menengah (IKM), meliputi kegiatan penyediaan bahan baku, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran, permodalan, kelembagaan, SDM, standarisasi mutu, jejaring kerjasama, pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan kluster.
 - o Penataan struktur industri, meliputi kegiatan optimalisasi sarpras penunjang industri, perlindungan dan pengawasan industri dan tenaga kerja.
 - o Pembangunan industri berbasis komoditas unggulan.
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi.
 - o Perluasan jangkauan pelayanan listrik di pedesaan
5. Sektor Bangunan, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - o Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan dan perkotaan
 - o Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung
 - o Pembangunan perumahan
 - o Penataan ruang daerah
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Promosi pariwisata dan pengembangan produk pariwisata
 - o Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, meliputi kegiatan fasilitasi peningkatan jumlah variasi distribusi produk, pelatihan peningkatan produk, permodalan, kelembagaan, jejaring kerjasama, perlindungan dan pelayanan konsumen, serta sarana / prasarana perdagangan
 - o Promosi penanaman modal dan pengembangan iklim investasi
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Peningkatan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan darat dan laut.
 - o Pengembangan pos dan telekomunikasi.
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa lainnya, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Pengembangan kelembagaan keuangan
 - o Peningkatan pengelolaan aset daerah
9. Sektor Jasa – Jasa, dengan indikasi program yang dilakukan :
 - o Fasilitasi kemudahan akses permodalan dan bintek ketenagakerjaan
 - o Penguatan dan pengembangan kelembagaan serta pengawasan dan penilaian kinerja koperasi dan usaha kecil menengah.

B. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan untuk mendorong perekonomian, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang secara makro akan lebih diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan meminimalkan berbagai kendala yang menghambat. Langkah – langkah kebijakan yang lebih serius juga akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum optimal pengolahannya selama ini antara lain di sektor pertanian, pertambangan dan galian, serta industri. Kebijakan fiskal diarahkan guna mempertajam prioritas kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.

Arah kebijakan umum pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah :

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan dan mandiri.
2. Peningkatan investasi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran.
3. Pengembangan kawasan perdesaan melalui pengelolaan potensi unggulan lokal dan penguatan kelembagaan.
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan ekonomi wilayah.

C. KEBIJAKAN ANGGARAN

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang pada dasarnya berprinsip pada pemanfaatan anggaran secara tertib, efektif dan efisien dengan mengalokasikan anggaran sesuai penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan maupun prioritas pembangunan daerah. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, maka kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang ditempuh dengan :

1. Kebijakan Pendapatan

Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan usaha BUMD dan Kelompok Ekonomi Produktif, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan potensial, peningkatan Dana Perimbangan serta agresif dan selektif dalam menangkap peluang investasi daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pembiayaan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan, berbasis kinerja, efisien, efektif, dan akuntabel.

- b. Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui bantuan umum dan bantuan khusus antara lain alokasi dana desa (ADD) dan pagu kecamatan.
- c. Bantuan Hibah untuk instansi vertikal diberikan secara selektif untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang lebih kondusif di Kabupaten Rembang.
- d. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- e. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB V RENCANA KERJA

Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Prioritas Program SKPD seperti yang tercantum di Renstra SKPD Tahun 2006 – 2010 perlu dilakukan penyesuaian. Dalam matrik rencana kerja SKPD urusan kewenangan tidak identik dengan nama SKPD. Selanjutnya Rencana kerja SKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 sebagaimana pada tabel berikut.

BAB VI RINGKASAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, diperlukan adanya penentuan pagu indikatif yaitu untuk mambatasi usulan SKPD agar lebih realistis dan tertukur, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menentukan alokasi anggaran yang relevan dengan upaya untuk mengakselerasikan pencapaian Visi Misi Daerah, maka dilakukan analisis dan kajian terhadap bidang – bidang pembangunan daerah yang secara langsung memiliki determinasi dan secara signifikan mendukung terhadap Visi Misi Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010.

Rencana Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel VI. 1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2009

NO	URAIAN	2008	Proyeksi 2009
1	PENDAPATAN DAERAH	576,004,241,000	579,791,628,000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47,342,347,000	51,129,734,000
	Hasil pajak Daerah	6,115,000,000	6,604,200,000
	Hasil Retribusi daerah	29,710,714,000	32,087,71,000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,161,040,000	6,653,923,000
	Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	5,355,593,000	5,784,040,000
1.2	DANA PERIMBANGAN	497,738,763,000	497,738,763,000
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan pajak	48,257,063,000	48,257,063,000
	Dana Alokasi Umum	398,410,700,000	398,410,700,000
	Dana Alokasi Khusus	51,071,000,000	51,071,000,000
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30,923,131,000	30,923,131,000
	Hibah	0	0
	Dana Darurat	0	0
	Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	17,410,362,000	17,410,362,000
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	13,512,769,000	13,512,769,000

Sumber : Bagian Keuangan Setda Rembang, 2008

Dengan rencana pendapatan sebesar Rp 579,791,628,000,- seperti yang tercantum pada Tabel VI.1 maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun pagu indikatif SKPD, dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan membatasi usulan dengan urgensi yang paling tinggi. Untuk menghitung sharing pagu indikatif anggaran tiap SKPD dalam membiayai belanja menggunakan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yakni mendasarkan pada faktor – faktor determinan anggaran belanja SKPD sesuai tujuan pembangunan (Renstra) SKPD Kabupaten Rembang. Namun mengingat penyusunan RKPD tahun 2009 adalah tahap keempat atau tahun keempat pelaksanaan RPJM 2006-2010 maka digunakan ‘*dua komponen*’ yang diasumsikan sebagai faktor-faktor determinan anggaran belanja SKPD sesuai tujuan pembangunan (Renstra) yaitu : komponen satu, adalah stakeholders perception index (SPI), yang menunjukkan urutan prioritas anggaran SKPD berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing SKPD terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang direpresentasikan oleh indeks-indeks pembangunan yang didasarkan pada empat pilar program pembangunan Daerah. Komponen dua, yaitu menunjukkan kapasitas dan peranan SKPD dalam pembangunan berdasarkan determinasi anggaran belanja tahun sebelumnya. Namun demikian sekenario seimbang tidak kaku dalam pengalokasian anggaran SKPD mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk sampai dengan alokasi anggaran masing-masing SKPD telah dilampaui proses dari mengakomodasi usulan masyarakat hingga pemeriksaan akhir (validasi, verifikasi dan appraisal) panitia anggaran eksekutif.
- Sebelum ditetapkannya alokasi hingga menjadi perda APBD, telah dilampaui pula pembahasan masing-masing kegiatan yang diajukan SKPD dengan pihak legislatif, yang diakhiri dengan penetapan kebijakan dan kegiatan yang layak dalam rapat paripurna penetapan anggaran DPRD
- Bahwa dengan demikian telah terjadi uji kelayakan dan konsesi kebijakan dari/antara SKPD kepada Kepala Daerah dan DPRD, sebagai representasi dari keputusan kebijakan yang maksimal pada tahun yang bersangkutan.

Pagu indikatif SKPD Tahun 2009 seperti pada tabel berikut :

Tabel VI. 2
Pagu Indikatif SKPD Tahun 2009

NO	SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	185,182,984,000	41,700,000,000	226,882,984,000
2	DINAS KESEHATAN	18,441,716,000	24,800,000,000	43,241,716,000
3	RSUD	10,537,032,000	14,200,000,000	24,737,032,000
4	DPU	4,427,316,000	49,500,000,000	53,927,316,000
5	BAPPEDA	1,400,508,000	4,600,000,000	6,000,508,000
6	DINAS PERHUBUNGAN	2,227,536,000	2,300,000,000	4,527,536,000
7	KKP	2,709,514,000	3,200,000,000	5,909,514,000
8	KANTOR CAPIL DAN KEPENDUDUKAN	601,503,000	1,400,000,000	2,001,503,000
9	BKBPM	4,085,108,000	3,600,000,000	7,685,108,000
10	DISKESOSNAKERTRANS	2,529,835,000	1,900,000,000	4,429,835,000
11	DISPERINDAGKOP	1,914,862,000	2,500,000,000	4,414,862,000
12	KESBANG LINMAS	923,420,000	1,400,000,000	2,323,420,000
13	SATPOL PP	835,004,000	2,400,000,000	3,235,004,000
14	DPRD	6,807,423,000	-	6,807,423,000
15	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	616,563,000	-	616,563,000
16	SEKRETARIAT DAERAH	69,039,259,000	-	69,039,259,000
	Bagian Kemasyarakatan		225,000,000	225,000,000
	Bagian Organisasi		467,000,000	467,000,000
	Bagian Kekayaan Daerah		894,000,000	894,000,000
	Bagian Keuangan		665,000,000	665,000,000
	Bagian Umum		9,500,000,000	9,500,000,000
	Bagian Infokom		750,000,000	750,000,000
	Bagian Pemerintahan		1,600,000,000	1,600,000,000
	Bagian Hukum		696,000,000	696,000,000
	Bagian Perekonomian		700,000,000	700,000,000
	Bagian Pengendalian			

NO	SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
	program		469,000,000	469,000,000
17	SEKRETARIAT DEWAN	1,552,802,000	7,600,000,000	9,152,802,000
18	DISPENLOPAS	6,148,177,000	3,200,000,000	9,348,177,000
19	BAWASDA	1,375,238,000	840,000,000	2,215,238,000
20	Kecamatan Rembang	1,588,939,000	361,000,000	1,949,939,000
21	Kecamatan Kaliori	540,346,000	218,000,000	758,346,000
22	Kecamatan Sulang	965,476,000	199,000,000	1,164,476,000
23	Kecamatan Sumber	350,469,000	186,000,000	536,469,000
24	Kecamatan Bulu	726,564,000	177,000,000	903,564,000
25	Kecamatan Lasem	687,317,000	249,000,000	936,317,000
26	Kecamatan Pancur	545,025,000	208,000,000	753,025,000
27	Kecamatan Sluke	336,509,000	161,000,000	497,509,000
28	Kecamatan Pamotan	786,029,000	212,000,000	998,029,000
29	Kecamatan Gunem	541,663,000	182,000,000	723,663,000
30	Kecamatan Sale	613,487,000	181,000,000	794,487,000
31	Kecamatan Kragan	605,580,000	227,000,000	832,580,000
32	Kecamatan Sedan	445,991,000	205,000,000	650,991,000
33	Kecamatan Sarang	582,979,000	204,000,000	786,979,000
34	BKD	1,435,656,000	2,150,000,000	3,585,656,000
35	KANTOR PARSIP DAN PDE	1,208,520,000	1,200,000,000	2,408,520,000
36	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	3,993,296,000	6,500,000,000	10,493,296,000
37	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	2,940,614,000	1,500,000,000	4,440,614,000
38	DISTAMBEN DAN LH	1,144,612,000	3,000,000,000	4,144,612,000
39	DIPARSENIBUD	1,480,960,000	1,600,000,000	3,080,960,000
40	DISKANLUT	1,998,421,000	5,000,000,000	6,998,421,000
JUMLAH		344,874,253,000	205,026,000,000	549,900,253,000

Sumber : Analisis, 2008

BAB VII KAI DAH PELAKSANAAN

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010 dan memuat kerangka kerja tahunan dari SKPD. RKPD menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2009. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan yaitu :

1. RKPD Tahun 2009 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat.
2. RKPD Tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2009.
3. RKPD 2009 menjadi acuan bagi SKPD dan Stakeholders yang lain dalam menyusun kegiatan pembangunan tahun 2009.
4. Masyarakat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan , program / kegiatan pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD Tahun 2009, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2009 ke dalam KUA , PPAS dan RAPBD Tahun 2009.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 ini merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun rencana Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009. Pedoman dan atau acuan ini disusun agar setiap instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas pembangunan dalam memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini sangat tergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua kepentingan serta kreativitas dan inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan sementara itu ego sektoral maupun ego instansional perlu dihilangkan. Untuk mencapai upaya maksimal maka koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan para pelaku yang berkepentingan dilakukan secara horisontal, vertikal, maupun diagonal baik melalui forum regular yang telah terprogram maupun forum parsial atau forum terfokus antar pelaku pembangunan (Stakeholders).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 juga dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI REMBANG

MOCH. SALIM